

ABSTRAK

Analisis Respon Masyarakat Kabupaten Tulungagung terhadap Pemberlakuan Program JKN sebagai Syarat Wajib Pelayanan Publik. Miftakhul Khusaini (2023) Karya Tulis Ilmiah Penelitian Studi Kasus dengan Pendekatan Kualitatif. Program Studi D3 Asuransi Kesehatan, Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Pembimbing Anggi Ardhiasti, SKM., MPH, Penguji Eko Rahman Setiawan, SKM., MKM
Kata Kunci : Jaminan Kesehatan Nasional, Pelayanan Publik, dan BPJS Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan target Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024, pemerintah mengeluarkan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di dalam kebijakan ini, program JKN dijadikan sebagai salah satu syarat wajib pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respons masyarakat Kabupaten Tulungagung terhadap kebijakan pemberlakuan program JKN sebagai syarat wajib pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 7 (tujuh) masyarakat Kabupaten Tulungagung baik yang sudah menjadi peserta JKN maupun yang belum menjadi peserta JKN. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keuntungan relatif yang akan dirasakan masyarakat apabila diberlakukan kebijakan program JKN sebagai syarat wajib pelayanan publik. Disamping itu, hasil juga menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dan kerumitan apabila kebijakan ini dijalankan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu masyarakat Kabupaten Tulungagung masih merespons baik dengan adanya kebijakan ini terlepas dari kerumitan yang akan mereka hadapi apabila kebijakan ini benar-benar dilaksanakan.

ABSTRAC

Analysis of Public Responses in Tulungagung Regency about Implementation of the JKN Program as a Mandatory Requirement for Public Services. Miftakhul Khusaini (2023) Scientific Paper Case Study Research with a Qualitative Approach. D3 Health Insurance Study Program, Major of Medical Records and Health Information, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Thesis Advisor Anggi Ardhiasti, SKM., MPH, Eko Rahman Setiawan, SKM., MKM

Keywords : National Health Insurance, Public Service, and BPJS Kesehatan

The purpose of this study was to determine the public response of Tulungagung Regency about Presidential Instruction Number 1 of 2022 which makes the JKN program a mandatory requirement for public service. The research method used is case study research with a qualitative approach. The subjects of this study were seven people of Tulungagung Regency, both those who had become JKN participants or not yet. The research is using interview in the collecting data and interview guideline as a research instrument where the number of questions is tentative, can be developed according to needs. The results of this study indicate that the seven informants stated that there is a relative advantage that will be felt by the people if the JKN program policy as a mandatory condition for public services is implemented in Tulungagung Regency. In addition to the relative advantages, the seven informants also stated that there are complications that will be faced if the policy is implemented, especially for people who are not yet become JKN participants. The results also showed that there was an aspect of compatibility which stated by 4 (four) informants about the implementation of the JKN program as a mandatory condition for public services, while 3 (three) other informants stated that there was a uncompatibility with this policy based on their experience and needs. The conclusion from this research is that the people of Tulungagung Regency still respond well to the existence of presidential instruction number 1 of 2022 regardless of the complications they will face if this policy is actually implemented.